

PENINGKATAN LITERASI POLITIK DIGITAL DALAM PENCEGAHAN CYBERBULLYING SEBAGAI UPAYA REVITALISASI KEWARGAAN

IMPROVING DIGITAL POLITICAL LITERACY IN PREVENTING CYBERBULLYING AS AN EFFORT TO REVITALIZING CITIZENSHIP

¹Imron Wasi, ²Efriza, ³Rochendi Suryadinata, ⁴Faojah

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pamulang
Jl. Pantura No.6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

email : ¹dosen10104@unpam.ac.id

ABSTRAK

Informasi yang diterima warga di dunia maya sering kali menimbulkan informasi yang tidak benar atau kabar bohong (hoaks), bahkan saat proses elektoral bergulir informasi ini bahkan muncul di ruang publik yang sekaligus berimbas kepada tindakan perundungan (*cyberbullying*) yang dilakukan oleh para warga lainnya yang berada di dunia maya. Selain itu, faktor masih rendahnya pendidikan literasi digital menjadi masalah utama, termasuk para pelajar. Fenomena ini berkelindan terhadap praktik politik di Indonesia, baik nasional maupun regional dan lokal. Oleh karena itu, partisipasi politik kewargaan sangat diperlukan, terutama peningkatan literasi digital terhadap warga maupun para pelajar. Sebab, hal tersebut masih menjadi tantangan yang serius mengenai keterlibatan warga dalam proses politik praktis dan interaksi sosial di ruang publik. Hal ini bisa berimbas terhadap kualitas pemilih pada palagan politik. Hal ini ditengarai karena masih lemahnya kesadaran politik kewargaan sekaligus minimnya keterlibatan pemerintah, partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap warga. Selain itu, politik di tingkat lokal cenderung menampilkan kekuatan figur sentral, terutama orang kuat lokal (*local strongmen*). Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sekaligus memperoleh sumber data dari sejumlah kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan (Zed 2004). Hasilnya, terdapat masalah utama antara rendahnya kesadaran digital dan politik. Sehingga, mengakibatkan para pemilih atau warga serta para pelajar yang masih sebagai pemilih pemula cenderung menjadi objek informasi hoaks tersebut, terutama saat kontestasi politik maupun dalam interaksi sosial. Dengan demikian, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memberikan edukasi politik sekaligus penguatan institusi lokal, termasuk menciptakan kesadaran pendidikan literasi digital dan politik masyarakat.

Kata Kunci : Literasi, Kewargaan, Politik, Cyberbullying, Pelajar.

ABSTRACT

Information received online by citizens often results in inaccurate information or hoaxes. Even during the electoral process, this information appears in public spaces, leading to cyberbullying by other citizens online. Furthermore, the low level of digital literacy education is a major problem, including among students. This phenomenon is intertwined with political practices in Indonesia, both nationally and regionally, and locally. Therefore, civic political participation is essential, particularly improving digital literacy among citizens and students. This remains a serious challenge regarding citizen involvement in practical political processes and social interactions in the public sphere. This can impact the quality of voters in the political arena. This is suspected to be due to the still weak civic political awareness and the minimal involvement of the government and political parties in providing political education to citizens. Furthermore, politics at the local level tends to display the power of central figures, especially local strongmen. The method used in this Community Service (PkM) activity utilizes a descriptive qualitative approach while obtaining data sources from various sources such as books, journals, and reports (Zed 2004). The results revealed a primary problem between low digital and political awareness. This results in voters, citizens, and students who are still new voters tend to become the target of hoax information, especially during political contests and social interactions. Therefore, this Community Service (PkM) activity provides political education while strengthening local institutions, including creating awareness of digital and political literacy education in the community.

Keywords : Literacy, Citizenship, Politics, Cyberbullying, Students.

Received:12/01/2026

Revised:14/02/2026

Accepted:01/03/2026

I. PENDAHULUAN

Sejak reformasi bergulir dalam alam politik Indonesia, sejumlah transformasi juga turut menyertai proses ini, terutama hasil yang telah diperoleh dari spirit reformasi. Dalam hal ini, fenomena yang mutakhir menjadi diskursus yang intensif, seperti, pemberian wewenang dari pusat ke daerah sesuai konstitusi yang telah berlaku. Dengan kata lain, ada proses pelimpahan wewenang kepada daerah untuk dapat mengelola aktivitas roda pemerintahan atau sering juga disebut ada proses desentralisasi, yang semula pembangunan di Indonesia ini cenderung bersifat sentralisasi. Artinya, merujuk pada aturan yang ada, pemerintah daerah memiliki hak otonomi menurut diktum yang ada dalam regulasi, seperti, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fenomena desentralisasi ini nampaknya sedang merambah di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif Rondinelli dan Cheema (1983) misalnya, desentralisasi dapat dimaknai sebagai transfer perencanaan, pengambilan keputusan, atau otoritas administratif dari pemerintah pusat ke unit-unit administrasi lokal, organisasi semi otonom, pemerintahan lokal dan organisasi nonpemerintah. Tak hanya itu, para *scholar* ini juga mengklasifikasikan tipe-tipe desentralisasi ini yang meliputi, desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi dan pasar.

secara bentuk, desentralisasi juga terbagi ke dalam empat hal, yakni: dekonsentrasi, devolusi, delegasi, dan transfer fungsi (Rondinelli dan Cheema, 1983: 18). Kemudian, desentralisasi menjadi sebuah gejala atau peristiwa yang mengglobal dan regional, seperti yang telah disebut oleh Bardhan dan Mookherjee (2006) yang menilik pada perspektif Bank Dunia. Bahkan, desentralisasi yang sedang berkembang di Indonesia ini juga sedang mengalami “ledakan besar” (Bank Dunia, 2003b; Bunte, 2004). Secara faktual, transisi otoritarianisme menuju pembangunan yang lebih demokratis disertai munculnya kebijakan otonomi daerah juga perlu ditelaah.

Saat ini, politik dan demokrasi lokal menjadi instrument yang substansial untuk menjaga stabilitas politik nasional. Adanya perkembangan politik di aras lokal tentunya dapat memengaruhi berbagai keputusan-keputusan dan dapat menyerap aspirasi publik dari *grassroots*. Sehingga, proses untuk mencapai kesejahteraan bisa dilakukan secara holistik. Dengan demikian, diperlukan upaya-upaya integrasi agar misi pusat-daerah ini juga relevan sesuai kebutuhannya masing-masing tanpa

mengekan otoritas lokal. Demokrasi di tingkat lokal ini juga tentu kecenderungannya hanya dijadikan objek politik semata saat proses elektoral muncul. Artinya, hal ini secara eksplisit menunjukkan bahwa rakyat hanya diperlakukan sebagai pemasok suara, bukan sebagai pemilik yang secara bersama-sama mengasah kecerdasannya untuk mengatasi masalah bersama (Bayo, Santoso, and Samadhi 2018).

II. METODE PELAKSANAAN

Realisasi yang bisa digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mencakup sebagai berikut:

- a) Tahap pertama, menyiapkan proposal, surat kontrak, surat permohonan dan dokumen pendukung lainnya, dan melakukan koordinasi dengan LPPM Universitas Pamulang;
- b) Tahap kedua, berkoordinasi dengan pemerintah dan entitas sosial yang akan mengikuti kegiatan atau sosialisasi PkM;
- c) Tahap ketiga, menyiapkan saran pendukung pelaksanaan dengan membuat Plakat, Spanduk, daftar absen dan konsumsi bagi peserta pengabdian;
- d) Tahap keempat, melaksanakan sosialisasi secara langsung dengan judul “Peningkatan Literasi Politik Digital dalam Pencegahan *Cyberbullying* sebagai Upaya Revitalisasi Kewargaan”.
- e) Tahap kelima, melakukan pendataan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta penyuluhan terkait permasalahan yang dilihat, didengar maupun dialami seputar materi.
- f) Tahap keenam, evaluasi kegiatan yang sudah terlaksana.
- g) Tahap ketujuh, diseminasi dan publikasi.

Kemudian, Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan pada bulan November 2025. Adapun tempat, waktu dan peserta pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Tempat	: Madrasah Aliyah Darul Irfan, Kota Serang, Provinsi Banten.
Waktu	: Pukul 09.00 – 11.40 WIB
Peserta	: 30 Orang

Dalam upaya mencapai tujuan penelitian dan menjawab permasalahan yang telah diidentifikasi, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena literasi politik digital, praktik

cyberbullying, dan implikasinya terhadap kewargaan digital di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi cara warga negara mengakses, mendiskusikan, dan berpartisipasi dalam politik. Di satu sisi, kemajuan ini memperluas ruang partisipasi politik yang lebih terbuka dan inklusif, terutama bagi generasi muda. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi ini juga memunculkan tantangan baru dalam praktik kewargaan, khususnya terkait maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, hingga tindakan *cyberbullying* yang merusak kualitas ruang publik digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik digital menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai bagian dari upaya revitalisasi kewargaan dalam konteks demokrasi kontemporer.



Gambar 1. Dokumentasi penyerahan Plakat

Literasi politik digital dalam konteks ini dipahami sebagai kemampuan warga untuk mengakses, mengevaluasi, memahami, dan menggunakan informasi politik secara kritis melalui media digital. Konsep ini mengacu pada pemikiran Mihailidis & Thevenin (2013) yang menyatakan bahwa literasi politik digital tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam menggunakan media, tetapi juga mencakup kesadaran kritis terhadap struktur kekuasaan, agenda media, serta kapasitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik digital secara aktif dan etis. Dalam pandangan Hobbs (2010), literasi digital sejati adalah kemampuan untuk menganalisis pesan media, mengevaluasi kredibilitas sumber, dan menciptakan pesan dengan kesadaran

sosial serta tanggung jawab moral. Di Indonesia, urgensi literasi politik digital sangat nyata. Berdasarkan laporan Microsoft (2021) melalui Digital Civility Index, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara yang disurvei terkait kesopanan di dunia maya. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya indeks ini adalah masifnya penyebaran hoaks (47%), ujaran kebencian (27%), dan *cyberbullying* (13%). Selain itu, survei dari Siberkreasi pada tahun 2019 di 18 kabupaten/kota menunjukkan bahwa 95,8% responden pernah menjumpai hoaks, sementara 54,4% dari mereka kesulitan membedakan antara fakta dan informasi palsu. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan ruang demokrasi digital menjadi rawan konflik dan manipulasi.



Gambar 2. Sesi Akhir Kegiatan PKM

Cyberbullying sebagai salah satu produk negatif dari rendahnya literasi digital, menjadi ancaman serius bagi proses demokratisasi, terutama di kalangan generasi muda. Livingstone et al. (2011) menjelaskan bahwa *cyberbullying* tidak hanya menyebabkan dampak psikologis bagi korban, tetapi juga berkontribusi pada pembungkaman suara publik, terutama kelompok yang rentan. Dalam ruang demokrasi digital, intimidasi daring terhadap lawan politik, aktivis, atau kelompok minoritas telah mempersempit ruang ekspresi dan membatasi partisipasi warga negara secara setara. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena berkelindan dengan rendahnya pendidikan politik dan dominasi elite dalam struktur kekuasaan lokal. Studi Hadiz (2022) menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia pasca-desentralisasi mengalami berbagai distorsi, seperti munculnya patronase politik dan penguasaan sumber daya oleh aktor-aktor lokal yang predatorik. Dalam kondisi

seperti ini, literasi politik digital menjadi kunci penting untuk menciptakan warga negara yang kritis, sadar hak, dan mampu menolak manipulasi politik melalui kanal digital. Revitalisasi kewargaan (*civic revitalization*) menjadi kerangka penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Ribble (2012) dalam konsep kewargaan *digital* (*digital citizenship*) menekankan bahwa warga negara yang baik di era digital harus mampu menggunakan media digital dengan tanggung jawab, etika, dan kesadaran sosial. Kewargaan tidak lagi hanya soal partisipasi dalam pemilu, tetapi juga mencakup cara warga berinteraksi, menyampaikan aspirasi, dan menyikapi informasi politik secara sehat dan konstruktif di ruang digital. Dalam konteks ini, peningkatan literasi politik digital menjadi fondasi bagi pembangunan kewargaan yang matang dan demokratis.



Gambar 3. Sesi diskusi PKM

Pendekatan ini selaras dengan teori demokrasi partisipatoris yang dikemukakan oleh Carole Pateman (1970), yang menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh sistem elektoral, tetapi oleh seberapa aktif dan kritis warga negara dalam kehidupan publik. Literasi politik digital memberi alat dan kerangka bagi warga untuk memahami isu-isu politik, mengawasi kinerja pejabat publik, serta mendorong akuntabilitas pemerintah melalui berbagai kanal digital. Ketika warga memiliki kapasitas literasi digital yang kuat, mereka tidak mudah terjebak dalam polarisasi, propaganda, maupun menjadi pelaku atau korban *cyberbullying*. Dalam praktiknya, beberapa negara maju seperti Finlandia, Swedia, dan Belanda telah menunjukkan bahwa literasi digital yang tinggi berkorelasi positif dengan kualitas demokrasi. The Economist Intelligence Unit (2018) mencatat bahwa negara-negara tersebut memiliki daya tahan tinggi terhadap disinformasi dan menunjukkan performa demokrasi yang stabil. Ini membuktikan bahwa

pembangunan literasi digital yang terintegrasi dengan sistem pendidikan dan kebijakan publik merupakan bagian dari strategi revitalisasi kewargaan yang efektif.

Dengan mempertimbangkan realitas politik dan sosial di Indonesia termasuk tingginya jumlah pengguna internet (APJII, 2021), dominasi pemilih muda dalam pemilu (KPU, 2023), dan maraknya ujaran kebencian di ruang digital maka peningkatan literasi politik digital bukan hanya kebutuhan, tetapi keharusan. Ini adalah langkah strategis dalam mencegah *cyberbullying*, mengurangi kerentanan terhadap hoaks, serta membentuk warga negara digital yang aktif, rasional, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, revitalisasi kewargaan di era digital perlu diarahkan pada pembangunan kapasitas literasi digital-politik masyarakat, khususnya generasi muda, agar demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat tumbuh lebih sehat dan berkelanjutan.



Gambar 4. Sesi Pemateri PKM

terlepas dari sudah meningkatnya kesadaran literasi digital ini, tetap saja masih ada tantangan-tantangannya, terutama masifnya disinformasi atau hoaks, jika merujuk kepada data Indeks Literasi Digital 2022, 72,6 persen responden menyatakan mendapatkan sumber informasi dari media sosial. Selain itu, 30,8 persen responden menyatakan media sosial sebagai sumber berita paling dipercaya. Jumlah ini hanya di bawah media televisi dengan 43,5 persen. Sementara situs web resmi pemerintah 10,1 persen, media daring 9,7 persen, dan media cetak 0,6 persen (Mulyana Sinaga 2023). Selain itu, warga yang sudah relatif dewasa dan anak-anak masih bisa berpotensi menjadi objek atas distribusi informasi hoaks. Bahkan, yang cukup rentan ialah warga lanjut usia. Literasi digital bagi warga lanjut usia sangat

dibutuhkan untuk meningkatkan dan memverifikasi data yang valid, agar tidak terpapar dan terhasut oleh kabar bohong. Literasi digital yang terbatas atau minim terhadap warga lanjut usia berpotensi menyebabkan mereka harus berhadapan vis a vis dengan kecepatan informasi yang masif di media sosial. Sehingga, dalam mengolah informasi sangat sukar untuk dilakukan, jika tidak ada edukasi secara sistemik. Informasi yang masif dan tanpa kontrol dari pengguna, termasuk warga lanjut usia berpotensi menyebabkan stres yang sewaktu-waktu bisa menimbulkan korban penipuan digital dan menerima kabar bohong begitu saja, tanpa adanya verifikasi data yang komprehensif. Sebab, warga lanjut usia sering kali menjadi salah satu aktor utama yang secara eksklusif mendistribusikan informasi kepada khalayak publik, tanpa diverifikasi terlebih dahulu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Santi Indra Astuti sebagai Manajer Program Tular Nalar, yang menyebutkan bahwa warga berusia di atas 45 tahun paling banyak menyebarkan hoaks (Mulyana Sinaga 2022).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Merujuk pada pembahasan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa masalah perundungan (*cyberbullying*) merupakan masalah utama yang dewasa ini dihadapi oleh para siswa, baik secara luring maupun daring. Berdasarkan jajak pendapat yang telah dilakukan menunjukkan bahwa para pelajar memahami masalah perundungan sebagai salah satu masalah serius. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi secara sistemik, terlebih perundungan yang dilakukan juga berbeda-beda. Dengan demikian, edukasi juga bukan sekadar diberikan oleh para guru di sekolah semata, melainkan oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, agar praktik-praktik tersebut tidak terulang kembali. Para siswa seringkali dihadapkan pada praktik-praktik tersebut yang menyebabkan psikologis mereka terganggu. Akibatnya, hal ini bisa memengaruhi pola pikir dan perilaku korban perundungan. Meski begitu, lingkungan juga tidak boleh membiarkan praktik tersebut dinormalisasi oleh khalayak publik.

B. SARAN

Tentunya memerlukan saran yang efektif untuk mencegah tindakan *cyberbullying*. Para peneliti memberikan saran di antaranya sebagai berikut: pertama, membangun ekosistem digital yang baik yang bisa difilter oleh

pemerintah, terutama yang sifatnya negatif seperti perundungan. Filterisasi ini bukan mengarah kepada pembatasan aksesibilitas penggunaan media sosial, melainkan untuk menjaga agar tidak menjadi contoh bagi para pengguna lainnya. kedua, edukasi secara sistemik kepada para pengguna media, termasuk publik pada umumnya melalui sarana kelembagaan seperti pendidikan formal. Ketiga, media massa perlu mentransmisikan informasinya sesuai realitas sosial. Keempat, penguatan literasi digital yang dilakukan secara berkala melalui workshop, seminar, dan Focus Group Discussion. Kelima, kolaborasi antarsektor baik pemerintah pusat dan daerah serta organisasi kepemudaan maupun kemahasiswaan, dan tokoh masyarakat.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan atas dukungan akademik, koordinasi, serta fasilitasi yang diberikan selama proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Apresiasi juga disampaikan kepada Universitas Pamulang yang telah menyediakan dukungan kelembagaan, sarana, dan lingkungan akademik yang kondusif sehingga kegiatan PKM ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Semoga kerja sama ini terus berlanjut dan semakin memperkuat peran perguruan tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Baran, S.J. & Davis, D.K. 2009. *Mass Communication Theory Foundation, Ferment and Future*. Boston: Wadsworth.
- Bayo, Longgina Novadona, Purwo Santoso, and Willy Purna Samadhi, eds. 2018. *Rezim Lokal Di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia., PolGov Fisipol UGM., dan University of Oslo.
- Blumler, J. G., & Katz, E. 1974. *The Uses of Mass Communications: Current Perspectives on Gratifications Research*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Blumler, Jay G., Katz dan Michael Gurevitch. 1974. *Utilization of Mass Communication by The Individual. The Uses of Mass Communication, Current Perspective on Gratification Research*. London: Sage Publication.
- Brownhill, Robert, and Patricia Smart. 1989. *Political Education*. London: Routledge.
- Budiardjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Nurfaizal, Muhammad, dan Imron Wasi. 2025. "Pentingnya Pendidikan Politik

- Bagi Pemilih Pemula Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum.” *Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM* 6(2). <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/50991>.
- Eka Sakti, Rangga/Litbang Kompas. 2023. “Eka Sakti, Rangga.” *Kompas.id*. https://www.kompas.id/artikel/tantangan-menepis-polarisasi-politik-pemilu-2024?open_from=Search_Result_Page.
- Hadi Saputro, Roman. 2021. “Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang.” *Journal Civics & Social Studies* 5(1): 147–57.
- Hadiz, Vedi R. 2022. *Lokalisasi Kekuasaan Di Indonesia Pascaotoritarianisme*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hagopian, Mark N. 1978. *Regimes, Movements, and Ideologies*. New York: Longman Inc.
- Handoyo, Eko, and Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. 2023. “Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024.” *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2(2): 187–200.
- Jumani. 2013. “Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum.” *Ilmu Pemerintahan Politik Pendidikan*: 180–95.
- Kartono, Kartini. 1989. *Pendidikan Politik*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Bandar Maju.
- Khoiron, M. Nur. 1999. *Pendidikan Politik Bagi Warga Negara*. Yogyakarta: LKIS.